

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan menjadi sebuah elemen sentral yang berupaya dicapai setiap negara di dunia. Dengan hal ini baik masyarakat maupun pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan perbaikan serta perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan baik dengan cara pemberdayaan, pembangunan, peningkatan mata pencaharian dan lainnya. Pemerintah melaksanakan penataan regulasi guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi yang sukses mampu mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah memberikan regulasi yang meringankan rakyat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Namun permasalahan kemiskinan tetap menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi nasional yang menyebabkan seseorang tidak dapat mensejahterakan dirinya (Fauziah et al., 2021). Tingkat kemiskinan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu negara. Itu tercermin dalam penetapan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) oleh PBB untuk masa 2015-2030 yang dikenal dengan istilah “*no poverty*” (Prasetyo & Fitanto, 2023). Kemiskinan merupakan salah satu tingkat penghambat untuk tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Serta itu tak sejalan dengan sila ke-lima Pancasila bahkan tidak sesuai juga dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mana telah memberi amanat bahwasanya negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kemiskinan ialah persoalan global yang terutama didapati negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa tingkatan yang mencerminkan suatu negara tergolong miskin ialah rendahnya pendapatan per kapita, tingginya pertumbuhan populasi (melebihi 2% per tahun), dominasi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja, serta terjebaknya masyarakat dalam siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Indonesia termasuk salah satu negara yang mencerminkan

karakteristik-karakteristik tersebut (Farid et al., 2020). Dalam pengembangan ekonomi yang menyeluruh, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 2ngkat yang sangat krusial (Nabilawaty & Hutajulu, 2022). Masalah kemiskinan muncul sebagai dampak dari tumbuh kembangnya ekonomi yang tak seimbang yang mengakibatkan makin besarnya kesenjangan pendapatan, baik di antara kelompok masyarakat hingga antar wilayah (*inter region income gap*). Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia mempunyai 2ngkata 2ngkata yang dapat dilacak hingga masa 2ngkatan Belanda, di mana pemerintah 2ngkatan mencoba mengatasinya melalui program Politik Etis. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi kedua masalah ini. Meskipun telah menerapkan berbagai kebijakan dan program dalam jangka waktu yang 2ngkata, kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Kasim, 2021). Kemiskinan dewasa ini tidak lagi sekadar dimaknai sebagai kekurangan materi atau keterbatasan ekonomi semata. Ia juga mencerminkan ketidakmampuan individu maupun kelompok dalam memperoleh hak-hak fundamental, disertai perlakuan diskriminatif yang menghalangi mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Hak-hak pokok tersebut meliputi jaminan atas rasa aman dari ancaman maupun tindak kekerasan, serta kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan politik.

Kemiskinan merupakan masalah universal yang berdampak pada masyarakat di berbagai belahan dunia dan memerlukan tindakan serius dari semua pihak terkait. Dalam lima dekade terakhir, meskipun telah tercatat kemajuan yang besar guna menaikkan kualitas hidup dan pengurangan angka kemiskinan, masalah ini masih menjadi hambatan utama bagi negara yang masih berkembang, termasuk Indonesia yang juga menghadapi tantangan guna mengatasi kemiskinan. Walaupun permasalahan kemiskinan terlihat rumit dan sulit untuk diselesaikan, pada prinsipnya setiap persoalan ekonomi dapat diatasi dengan cara mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan 2ngkat yang tepat (Ronald Banito et al., 2022). Permasalahan kemiskinan menjadi sangat kritis terutama di wilayah-wilayah yang tertinggal secara ekonomi. Meskipun berbagai upaya pengembangan ekonomi daerah telah dilaksanakan, kemiskinan masih tetap ada. Kemajuan ekonomi dan

tingkat kesejahteraan sangat terkait dengan kapasitas dan pola pikir setiap individu. Kondisi ini berdampak buruk bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan pengetahuan, padahal pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan kunci untuk memajukan perekonomian.

Individu yang terjat dalam kemiskinan akan menghadapi kesulitan untuk bangkit dari kondisi tersebut. Bilamana pemerintah tidak menangani masalah kemiskinan secara efektif, hal ini dapat memicu berbagai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang merugikan negara. Lebih lanjut, kemiskinan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan politik dalam sektor ekonomi nasional (Atina & Setyowati, 2022). Faktor penyebab kemiskinan dapat datang dari minimnya sumber daya guna mencukupi keperluan dasar atau minimnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan (Delviera & Amar, 2024). Dijabarkan oleh (Nisa et al., 2020) bahwasanya problem kemiskinan dapat berdampak pada segala urusan kehidupan manusia. Jumlah populasi yang meingkat cenderung akan menyebabkan berbagai masalah social, terutama terkait dengan kemiskinan bilamana tak dibarengi dengan naiknya kualitas SDM-nya. Itu akan berakibat pada ketidakmampuan kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan akan memperparah masalah kemiskinan (Dinata et al., 2020). Karena peresnetase penduduk miskin yang tinggi dan pemasukannya rendah, maka minat beli masyarakat di daerah menjadi berkurang. Situasi ini makin genting saat angka pengangguran di daerah tersebut ikut menjulang, seperti halnya di Kota Jambi.

Tabel 1.1 Gambaran Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi

Tahun	Kemiskinan (ribu jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2000	42.000	5,05
2010	30.000	9,90
2020	50.440	9,86
2021	54.230	9,24
2022	50.400	9,13
2023	50.090	10,22
2024	47.250	10,45

Sumber : *BPS, 2025*

Kemiskinan merupakan isu kompleks yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan, termasuk di Kota Jambi. Tren kemiskinan di Kota Jambi mencerminkan fluktuasi yang menarik untuk dianalisis. Pada awal periode 2002 hingga 2007 tingkat kemiskinan di Kota Jambi masih relative stabil, yaitu berada di kisaran 5 persen. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup besar yakni pada tahun 2008 mencapai 11,63%. Akan tetapi lonjakan ini menurun secara bertahap tepat setahun setelahnya, yaitu menjadi 10,54% pada tahun 2010, dan kian menurun menjadi 9,27% pada tahun 2011. Tren penurunan ini terus berlanjut konsisten hingga mencapai titik terendah, yaitu sekitar 8,12% pada tahun 2019. Itu memperlihatkan bahwasanya adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan dijalankannya program pengentasan kemiskinan. Namun, pada tahun 2020, terjadi sedikit peningkatan, yaitu menjadi mencapai 8,27% dan disusul setahun setelahnya menjadi mencapai 9,02%. Itu bisa terjadi kemungkinan karena terdampak oleh pandemic COVID-19 yang memengaruhi berbagai sector ekonomi di Kota Jambi. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi selama masa pandemi mengakibatkan berbagai perubahan pada kondisi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi, yaitu peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan masyarakat, perubahan pola ekonomi, serta sector lainnya yang terdampak seperti sector pariwisata dan sector perhotelan.

Banyaknya permasalahan ekonomi yang berujung pada meningkatnya kemiskinan, salah satunya berasal dari penurunan pendapatan masyarakat. Ketidaksamaan pembagian pendapatan ialah salah satu aspek yang lengket dengan kemiskinan yang masih menjadi perihai bagi negara maju maupun negara berkembang. Itu memerlukan kajian mendalam mengenai perbedaan pendapatan antara warga atau wilayah yang sudah maju dengan yang masih tertinggal. Ketimpangan sudah abadi menjadi isu genting dalam mempertimbangkan kebijakan ekonomi di negara berkembang. Kondisi ini muncul karena strategi pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan pertumbuhan yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya kesenjangan. (Oktaviani et al., 2022). Tidak hanya ukuran pendapatan nasional dan pendapatan perkapita yang menentukan kemajuan negara, sistem pemerataan pendapatan nasional juga menjadi focus penting. (Wenda et al., 2025). Meningkatnya kesenjangan pendapatan berbanding lurus dengan bertambahnya ketidakmerataan distribusi, sehingga menciptakan jurang perbedaan penghasilan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut sulit dihindari karena dampak trickle-down effect dari pertumbuhan ekonomi nasional pada kenyataannya hanya terserap oleh segelintir kelompok kecil dengan kepentingan tertentu.

Kesenjangan pendapatan ialah fenomena yang kerap muncul seiring dengan dinamika pembangunan wilayah, termasuk di Kota Jambi. Isu ini menuntut penanganan serius karena berisiko memicu ketegangan sosial-ekonomi dan bahkan merusak relasi antarwilayah. Untuk menilai tingkat ketidakmerataan tersebut, salah satu ukuran yang lazim dipakai ialah Indeks Gini. (Nengsih et al., 2023). Ketimpangan pendapatan di Kota Jambi mencerminkan fluktuasi dari tahun 2002 hingga tahun 2024. Selama dua decade terakhir, *Gini Ratio* di Kota Jambi berada dalam rentang nilai terendah yaitu 0,273 pada tahun 2002 hingga nilai tertinggi mencapai 0,390 pada tahun 2015 dan 2017. Seusai tahun 2017, rasio gini memperlihatkan tren turun dan stabilisasi. Itu ditunjukkan dari menurunnya rasio gini pada tahun 2018 dan 2019 yaitu mencapai 0,330 dan 0,339. Kemudian peningkatan terjadi peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023 menjadi mencapai 0,371. Pada tahun 2024, *Gini Ratio* di Kota Jambi tercatat mencapai 0,315. Berdasar

pada analisis tersebut, ketimpangan pendapatan di Kota Jambi tidak terlalu ekstrem, mengingat rasio nilainya yang masih berada dibawah 0,49, bahkan menyentuh 0,273 yang termasuk dalam klasifikasi ketimpangan yang rendah.

Dalam upaya memajukan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, suatu negara tidak hanya perlu memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan, tetapi juga kualitas SDM yang dinilai lewat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan pembangunan di sebuah area tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi dana yang dialokasikan pemerintah. Faktor-faktor seperti tingkat investasi dan mutu masyarakat juga memainkan peran yang sangat penting. Banyaknya SDM yang bermutu, memungkinkan mereka dapat berdampak positif dalam memajukan perekonomian di daerah tersebut. Dalam menilai kemajuan suatu wilayah, tidak cukup hanya melihat dari sisi pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek pengembangan sumber daya manusianya (Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022). Tingginya mutu masyarakat akan turut meningkatkan produktivitas dan upah yang tinggi pula. IPM berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai hasil pembangunan wilayah secara menyeluruh, mencakup aspek harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak (Ashari & Athoillah, 2023). Ketika suatu daerah mempunyai IPM yang rendah, hal ini akan mengakibatkan berbagai masalah yang saling berhubungan. IPM yang berada di level rendah mencerminkan bahwasanya kualitas SDM di daerah tersebut masih kurang baik yang mengakibatkan produktivitas kerja menjadi tidak optimal. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas dan penghasilan masyarakat pun menurun. Saat masyarakat mengalami penurunan pendapatan, mereka akan makin kesulitan untuk membebaskan diri dari jeratan kemiskinan. Situasi ini menciptakan sebuah pola kemiskinan yang terus berulang dan sulit untuk diatasi, sehingga menimbulkan lingkaran kemiskinan (Nalle et al., 2022). Selama satu decade terakhir, IPM di Kota Jambi mencerminkan tren pelonjakan yang spesifik. Saat 2010, IPM di Kota Jambi berada di angka 72,23% kemudian turun pada tahun 2011 menjadi 72,96% dan meningkat secara konsisten sampai pada puncaknya yaitu pada tahun 2024. Pada tahun 2024, indeks pembangunan manusia di Kota Jambi bernilai mencapai 81,77% yang termasuk pada kategori sangat tinggi bilamana diperbandingkan dengan

wilayah kabupaten lainnya. Pembangunan manusia di Kota Jambi konsisten berada pada trek kenaikan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Kota Jambi sudah berada di level “tinggi”. Saat 2020–2024, IPM Kota Jambi rata-ratanya melonjak mencapai 0,80 persen tiap tahun, dari 79,19 saat 2020 jadi 81,77 saat 2024.

Selain IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga punya pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Itu disebabkan karena banyaknya penduduk dengan usia kerja atau Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan banyaknya kuantitas lapangan pekerjaan yang ada (Lestari et al., 2021). Akibatnya, kelompok penduduk yang berada pada usia produktif justru berkontribusi menambah jumlah pengangguran yang pada gilirannya mendorong peningkatan angka kemiskinan di Kota Jambi. TPAK sendiri merepresentasikan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan total penduduk usia kerja. Makin besar proporsi masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja sesuai dengan struktur umur penduduknya, maka makin tinggi pula nilai TPAK yang tercatat. (Matondang et al., 2024). TPAK di Kota Jambi secara garis besar terus berfluktuasi dari masa ke masa. Pada tahun 2007, TPAK di Kota Jambi hanya berkisar 56,24% yang mencerminkan bahwasanya sebagian besar penduduk usia kerja di Kota Jambi belum aktif bekerja. Pada tahun 2011 TPAK di Kota Jambi meningkat menjadi mencapai 63,71% mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu menjadi 60,31%. Kemudian melonjak naik pada tahun 2014 dan 2015 mencapai 62,39% dan 64,04%. TPAK di Kota Jambi menyentuh angka tertingginya di tahun 2019, mencapai 66,30%. Pada tahun 2020, terjadi tren penurunan TPAK menjadi mencapai 64,12%. Itu terjadi karena kemungkinan terdampak akibat pandemic COVID-19 yang memengaruhi berbagai sector ekonomi. Kemudian terjadi peningkatan hingga tahun 2024 menjadi mencapai 66,40%.

Berdasar pada pemaparan data di atas, bisa disimpulkan bahwasanya tingkat kemiskinan di Kota Jambi tak kunjung menurun. Nilai Indeks Gini di Kota Jambi cukup rendah yaitu hanya berkisar 0,306 jauh dari angka 1. Nilai Indeks Gini berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan, makin rendah nilai Indeks Gini maka makin rendah pula tingkat kemiskinan. Namun, berbeda halnya dengan IPM yang

berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Berdasar pada datanya, persentase IPM Di Kota Jambi cukup tinggi, bahkan menyentuh 81,77%, akan tetapi persentase tingkat kemiskinan tak kunjung menurun. Begitu pula dengan TPAK yang dalam teori ekonomi, tingginya 8ngkatan kerja berdampak akan mendorong berkurangnya tingkat pengangguran terbuka yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan (Sianturi et al., 2024). Namun persentase TPAK yang cukup tinggi di Kota Jambi tidak mencerminkan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Data yang dipaparkan pada latar belakang berkontradiksi dengan teori ekonomi yang ada. Perbedaan ini menarik peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang adanya Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan, khususnya di Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan di Kota Jambi merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Walaupun angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, namun hal tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Demikian pula dengan TPAK yang relatif tinggi, namun tidak serta-merta mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan justru memperlihatkan pola fluktuatif yang berpotensi memperlebar jurang sosial-ekonomi di masyarakat.

Kondisi kontradiktif ini menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa peningkatan IPM dan TPAK yang secara teori seharusnya menekan angka kemiskinan, ternyata tidak selalu mencerminkan hasil yang konsisten di lapangan? Apakah ketimpangan pendapatan menjadi faktor yang lebih dominan dalam mendorong naik turunnya angka kemiskinan di Kota Jambi? Ataukah terdapat faktor lain di luar ketiga variabel tersebut yang turut memengaruhi kondisi kemiskinan? Berdasar kepada latar belakangnya, didapatlah rumusan masalah dalam penelitiannya diantaranya:

1. Bagaimana kondisi Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Jambi tahun 2000 – 2024.
2. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2000 – 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar kepada uraian rumusan masalahnya, maka didapatkan tujuan daripada dilaksanakannya penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kondisi Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Jambi tahun 2000 – 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi periode tahun 2000 – 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat yang diharapkan dari kajian ini diantaranya:

1. Bagi penulis, menjadi bahan untuk melatih, menulis, dan berpikir secara ilmiah dengan menjalankan teori dan literatur yang ada. Khususnya di sektor Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang memberi pengaruh pada Tingkat Kemiskinan.
2. Bagi pemangku kebijakan, kajian ini diinginkan bisa memberi keterangan yang bermanfaat guna mendalami faktor yang bisa memberi pengaruh pada tingkat kemiskinan yang kemudian bisa dipahami solusi yang harus ditempuh untuk menanggulangi masalah kemiskinan